

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

PERBUP NO. 55, BD 2017/NO.55, 23 HLM.

PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 21 Tahun 2001; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab Mimika No. 4 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang menjadi kewenangan daerah. Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. penyusunan perencanaan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten; b. perumusan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten; c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten; d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten; e. pelaksanaan kegiatan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung; f. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung; g. pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; h. pelaporan hasil kerja. Susunan Kedudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung terdiri dari: Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang Pengembangan Lembaga Masyarakat, Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, Bidang Pemerintahan Kampung, Unit pelaksana teknis dinas dan Kelompok jabatan fungsional. Kepala Dinas memimpin pelaksana tugas dan fungsi sebagaimana yang telah tertulis. Sekretaris adalah unsur membantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dan merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Bidang Pengembangan Lembaga Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan aparatur pemerintah, melakukan penataan dan pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, pelaksana pembinaan bantuan kelurahan, pelaksana fasilitasi kebijakan pemantapan system pendataaf profil kemasyarakatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang Pengembangan Lembaga Masyarakat mempunyai tugas merumuskan kebijakan, menyusun rencana dan program kerja, mengoordinasikan,

membina dan mengendalikan, serta memantau dan mengevaluasi kegiatan Penataan dan Kerja Sama Kampung. Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan teknologi tepat guna. Bidang Pemerintahan Kampung adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang ini mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, melaksanakan administrasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyalia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas di bidang Pemerintahan Kampung. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas, tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas jabatan pada Unit Pelaksana Tugas Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan untuk menunjang tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dengan keahlian dan keterampilan tertentu. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan kerja masing-masing maupun di lingkungan Dinas serta dengan organisasi perangkat daerah lainnya, selain itu wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Dalam hal Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris dan dalam hal Sekretaris berhalangan pula, Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya dan / atau sesuai dengan bidang tugasnya. Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. Pembiayaan Dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

- CATATAN : - Peraturan Bupati ini diundangkan pada tanggal 25 Oktober 2017 dan ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2017.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Mimika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.